

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL
3. NHK : 622479

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.542.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m<sup>2</sup>/71 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 319.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m<sup>2</sup>/69 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m<sup>2</sup>/69 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **280.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF125TR / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/ MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV RM3 2WD2.4AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **---****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **558.415.996****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **---**



Sub Total	Rp.	2.380.915.996
III. HUTANG	Rp.	28.137.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.352.778.996

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.